

## **Literasi Politik Terhadap Perempuan di Desa Air Panas Sungai Abu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024**

**A Zarkasi<sup>1</sup>, Firmansyah Putra<sup>2</sup>, Dimas Rizal<sup>3</sup>, Ahmad Baidawi<sup>4</sup>**

Afiliasi: <sup>1-4</sup> Universitas Jambi

Email Korespondensi Penulis: <sup>3\*</sup> [dimasrizal@unja.ac.id](mailto:dimasrizal@unja.ac.id)

### **Abstrak**

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu yang diadakan di kebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat melainkan untuk memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan politik. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat memiliki wadah untuk menentukan pemimpinnya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan aspirasi yang mana masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal penting agar terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di bidang politik masih tertinggal dari pada laki-laki. Metode yang digunakan dengan pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada keterlibatan aktif kaum ibu-ibu, metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum ibu-ibu dan meminimalisir terjadinya money politic sebagai target dari keterlibatan pada pemilu tahun 2024. Pendekatan pengabdian dilakukan dengan konsep pendampingan dengan beberapa metode pendekatan, meliputi workshop, Ceramah, diskusi.

**Kata Kunci :** Pemilihan Umum, Pemilih Perempuan, Politik.

### **Abstract**

General elections (elections) are a means of exercising popular sovereignty, where the people determine their own choices for those they trust. This means that the people have full authority to determine their leaders, as they hold the highest authority. Elections held in most democratic countries are considered a symbol and benchmark of democracy itself, as the conditions of openness and freedom of association are considered to fairly accurately reflect public participation and aspirations. Voting is not only a civic obligation but also a means of fighting for socio-economic and political rights. Through general elections, the public has a platform to determine their leaders who will lead for the next five years, to fight for their interests and listen to aspirations, where the public participates in determining policies that will be formulated by government candidates. Women's representation in the political sphere is crucial for creating a culture of public policy-making that is friendly and sensitive to women's interests. However, in reality, women's representation in politics still lags behind men's. The method used with the empowerment approach (active participation) is based on the active involvement of mothers, this method aims to increase the participation of mothers and minimize the occurrence of money politics as a target of involvement in the 2024 elections. The service approach is carried out with the concept of mentoring with several approach methods, including workshops, lectures, discussions.

**Keywords:** *General Election, Female Voters, Politics.*

**Informasi Artikel:** Submit: 10-01-2026 Revisi: 25-01-2026 Diterima: 05-03-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu yang diadakan di kebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus dijalankan dengan baik oleh setiap warga negara, dengan demikian konsep demokrasi dapat terwujud dengan baik. Pemilu memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintar R. Saragih, menjelaskan bahwa pemilu merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.

Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat melainkan untuk memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan politik. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat memiliki wadah untuk menentukan pemimpinnya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan aspirasi yang mana masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 perlu disikapi dengan peningkatan Literasi politik. Literasi yang dimaksud adalah bagaimana pemilih dalam membaca serta menganalisis proses, input, dan output politik itu sendiri. Dalam konteks pemilih, yang dikatakan pemilih adalah pihak yang menjadi tujuan dari aktor politik dalam berkontestasi untuk dipengaruhi dan mereka yakinkan supaya dapat menerima serta mendukung kandidat tersebut dan memberikan hak pilihnya kepada aktor yang ikut pada pemilihan pemimpin tersebut. Selanjutnya perilaku politik merupakan tindakan seseorang secara individual atau secara kelompok dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Salah satu bentuk dari perilaku politik adalah ketika masyarakat memilih calon pemimpin pada saat dilaksanakannya pemilihan umum.

Keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal penting agar terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di bidang politik masih tertinggal dari pada laki-laki. Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan.

Satu tahun lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih perempuan untuk berpartisipasi aktif pada pemilu 2024. Di kabupaten kerinci dalam hal ini penulis mengambil Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci sebagai objek pengabdian, karena kaum perempuan akan menjadi penyumbang suara terbanyak di Desa Air Panas Sungai Abu. Hal ini dikarenakan kaum laki-laki lebih banyak yang merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah. Hal ini menjadi menarik karena pada pemilu 2024 target para kontestan pemilu akan tertuju lebih besar ke kaum ibu-ibu. Penulis mengamati persoalan dilapangan, dimana kaum ibu-ibu akan menjadi target pasar dari para kontestasi pemilu, maka penulis melihat kaum ibu-ibu harus dibekali literasi politik agar bisa menentukan pilihan terbaik pada pemilu nanti. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya money politic pada kaum ibu-ibu.

Di Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci mayoritas kaum pria mencari nafkah untuk keluarganya merantau ke Malaysia, sehingga dalam pemilu 2024 mendatang target utama para kontestan partai politik dalam mencari masa simpatisannya adalah ibu-ibu. Sehingga perlu yang namanya peningkatan Literasi politik terhadap kaum ibu-ibu dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2024. Ini juga menjadi tanggung jawab insan akademisi terutama di bidang Ilmu Politik dalam memberikan peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya money politic di tengah masyarakat khususnya kaum ibu-ibu serta menjadikan pemilu yang bersih dan transparan. Situasi ini dapat membantu penulis dan mitra dalam melakukan stimulus kepada kaum ibu-ibu mengenai partisipasi politik mereka pada pemilu 2024. Serta dampak yang akan ditimbulkan untuk masyarakat Kabupaten Kerinci lima tahun kedepan terhadap terpilihnya calon pemimpin pada pemilu mendatang.

**B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada keterlibatan aktif kaum ibu-ibu, metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum ibu-ibu dan meminimalisir terjadinya money politic sebagai target dari keterlibatan pada pemilu tahun 2024. Pendekatan pengabdian dilakukan dengan konsep pendampingan dengan beberapa metode pendekatan, meliputi workshop, Ceramah, diskusi.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam proses pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian memberikan materi dengan cara pemaparan dan diskusi kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat yang dijadikan subjek pengabdian bisa memahami tentang tema yang tim targetkan. Adapun materi yang tim pengabdian berikan kepada masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci antara lain: Literasi Politik yang dimaksud adalah bagaimana pemilih dalam membaca serta menganalisis proses, input, dan output politik itu sendiri. Pemilih adalah pihak yang menjadi tujuan dari aktor politik dalam berkontestasi untuk dipengaruhi dan mereka yakinkan supaya dapat menerima serta mendukung kandidat tersebut dan memberikan hak pilihnya kepada aktor yang ikut pada pemilihan pemimpin tersebut.



Dalam kegiatan pengabdian, tim pengabdian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah politik uang. Hal ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih pemimpinnya untuk dijadikan sebagai wakil masyarakat. Literasi ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat menerima politik uang

dikarenakan berdampak buruk terhadap proses demokrasi dalam menentukan calon pemimpin mereka.



Tim pengabdian juga memberikan literasi kepada pemilih perempuan di lokasi pengabdian tentang partai politik yang terlibat dalam kontestasi pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Hal ini diharapkan pemilih perempuan memahami bagaimana ideologi dari partai politik yang ikut berkontestasi pada Pemilihan Umum tahun 2024. Literasi partai politik ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada subjek pengabdian tentang bagaimana cara mereka mempertimbangkan dalam penentuan calon pemimpin yang nantinya mereka pilih.



## **PARTAI PESERTA PEMILU**

**2024**

Melihat melihat rekam jejak, visi, dan misi Partai dan yang dicalonkan oleh partai.



## **D. KESIMPULAN**

Dari hasil pengabdian masyarakat di Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, tim pengabdian melihat antusiasnya kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang kami selenggarakan. Hal ini menjadi daya tarik bagi insan akademi dalam memberikan pemahaman tentang Literasi Politik kepada perempuan dikarenakan masih minimnya pemahaman mereka terhadap dunia politik. Sehingga dengan adanya literasi politik yang diberikan akan memberikan rangsangan kepada kaum perempuan khususnya di daerah Kabupaten Kerinci untuk mengenal lebih dalam tentang ruang lingkup politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anifatul Kiftiyah. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia". Jurnal Yuridis, Vol.6, Tahun 2019.
- AW Widjaja, Titik Berat Otonomi Daerah, Jakarta, Raja Grafindo, 1998.
- Bintar R. Siragih. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Gaya Media Pratama. Jakarta. 1998.
- Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Jhon W. Creswell, Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.
- Matthew, B. M., & Huberman, A.M. Analisis Data Kualitatif. Jakarta; UI.Press. 2014.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

**JCOMENT (Journal of Community Empowerment)**

EISSN: 2745-875X, Vol. 7 No.1 (2025): Community Empowerment Hal: 1-7

DOI: <https://doi.org/10.55314/jcoment.v7i1.1106>

Sri Kusriyah, Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Semarang, Unissula Press,  
2019.

Siti Waridah dkk, Sejarah Nasional dan Umum, Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003.